

**PERLINDUNGAN HUKUM SERTIPIKAT ELEKTRONIK YANG
HILANG DALAM DATABASE BRANKAS ELEKTRONIK PADA
APLIKASI SENTUH TANAHKU**

Nama: Rita Kartika Jayanti, S.H., M.Kn.

Jurusan/ Program Studi: Hukum / Magister Kenotariatan

Pembimbing: Dr. David Hardjo, S.H., M.H., M.Kn., CHCM

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah memengaruhi administrasi pertanahan, salah satunya adalah kebijakan digitalisasi sertipikat oleh kementerian ATR/BPN melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Walaupun digitalisasi ini memberikan kemudahan, tetapi muncul kekhawatiran terkait hilangnya sertipikat elektronik dalam sistem aplikasi mengingat ketiadaan mekanisme penyelesaian yang jelas, yang dapat merugikan pemilik tanah mengingat sifatnya yang sepenuhnya berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan penyelesaian dan mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan ketika sertipikat elektronik hilang dalam database brankas elektronik pada aplikasi Sentuh Tanahku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi melalui penggunaan sertipikat tanah elektronik dalam aplikasi Sentuh Tanahku masih memiliki kekosongan norma hukum yang mengatur secara spesifik tentang tata cara penyelesaian apabila terjadi kehilangan data sertipikat dalam aplikasi Sentuh Tanahku. Sehingga saat ini, masyarakat yang kehilangan sertipikat elektronik masih mengikuti prosedur lama yang digunakan pada kasus kehilangan sertipikat fisik. Sehingga pemerintah perlu menyelaraskan regulasi KUHAP agar sertipikat elektronik diakui sebagai alat bukti sah di pengadilan, serta meningkatkan keamanan sistem penyimpanan data, verifikasi yang kuat, dan layanan aduan yang responsif dalam aplikasi Sentuh Tanahku. Selain itu, perlu dilakukan revisi Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) UU ITE untuk memperluas cakupan subjek hukum, mencakup badan hukum dan instansi pemerintah, untuk menjamin kepastian hukum atas perlindungan data dan dokumen elektronik publik.

Kata kunci: Sentuh Tanahku, sertipikat elektronik, perlindungan hukum, digitalisasi pertanahan, hak atas tanah

**LEGAL PROTECTION OF LOST ELECTRONIC CERTIFICATES IN THE
ELECTRONIC SAFE DATABASE ON THE SENTUH LANAHKU
APPLICATION**

Name: Rita Kartika Jayanti, S.H., M.Kn.

Dicipline / Study Proram: Law / Master of Notary

Contributor : Dr. David Hardjo, S.H., M.H., M.Kn., CHCM

ABSTRACT

The development of information technology in the digital era has influenced land administration, one of which is the digitalization policy of certificates by the Ministry of ATR/BPN through the Sentuh Tanahku application. Although this digitalization provides convenience, there are concerns regarding the loss of electronic certificates in the application system considering the absence of a clear resolution mechanism, which can be detrimental to landowners considering its completely digital nature. This study aims to find a solution and identify forms of legal protection that can be applied when electronic certificates are lost in the electronic safe database on the Sentuh Tanahku application. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that the digitalization policy through the use of electronic land certificates in the Sentuh Tanahku application still has a lack of legal norms that specifically regulate the procedures for resolving the loss of certificate data in the Sentuh Tanahku application. So that currently, people who lose electronic certificates still follow the old procedures used in cases of lost physical certificates. So the government needs to align the Criminal Procedure Code regulations so that electronic certificates are recognized as valid evidence in court, as well as improve the security of data storage systems, strong verification, and responsive complaint services in the Sentuh Tanahku application. In addition, it is necessary to revise Article 32 paragraph (1) and Article 48 paragraph (1) of the ITE Law to expand the scope of legal subjects, including legal entities and government agencies, to ensure legal certainty for the protection of public electronic data and documents.

Keywords: *Sentuh Tanahku applicaton, electronic certificate, legal protection, land digitalization, land rights*